

## **SOSIALISASI, PENYADARAN DAN INTERNALISASI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER PADA KELUARGA DIFABEL TUNANETRA DI LINGKUNGAN PERTUNI SUMATERA UTARA**

**Harmona Daulay\*, T.Ilham Saladin, Muba Simanihuruk, Rahman Malik**

*Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.*

\*Penulis Korespondensi: [harmonadaulay@usu.ac.id](mailto:harmonadaulay@usu.ac.id)

### **Abstrak**

*Isu gender dan ketidakadilan gender masih mewarnai relasi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Berbagai ketidakadilan gender bisa dialami oleh perempuan maupun laki-laki. Diskriminasi gender juga membuat relasi yang tidak seimbang. Isu diskriminasi juga secara umum terkadang dialami oleh difabel. Tidak terkecuali difabel tunanetra baik laki-laki maupun perempuan. Secara fakta perempuan difabel tunanetra mengalami bias gender yang lebih besar. Ketika penyandang difabel tunanetra mengalami diskriminasi secara sosial dan gender tentu itu kondisi diskriminasi berganda. Pengabdian masyarakat ini tertarik melihat isu gender yang terjadi pada kaum difabel tunanetra. Dari diskusi awal dengan para difabel tunanetra tentang isu gender memperlihatkan mereka belum di berikan wawasan dan pendampingan yang relatif baik. Padahal dalam konteks kehidupan sosial sering terjadi ketidakadilan gender, bias gender dan konflik gender. Diperlukan sosialisasi tentang pengertian konsep, teori dan ilustrasi praktek keadilan gender untuk pengetahuan dan internalisasi kepada kaum difabel tunanetra baik laki-laki maupun perempuan. Untuk itu pengabdian masyarakat ini dilakukan, dengan metode yang dilakukan adalah proses pendampingan masyarakat difabel melalui sosialisasi, penyadaran dan internalisasi kesetaraan dan keadilan Gender pada Keluarga Difabel Tunanetra di Lingkungan Pertuni Sumatera Utara. Sedangkan untuk rencana tidak lanjut dari pengabdian masyarakat ini meliputi : Melakukan sosialisasi dan pendampingan pada keluarga difabel untuk melihat internalisasi sensitivitas gender dalam praktek relasi gender, memasang plang pengabdian di lokasi pengabdian, melakukan evaluasi semua pelaksanaan pengabdian, melakukan evaluasi peta konstruksi gender yang ada di Pertuni Medan. Diharapkan dengan evaluasi peta konstruksi gender akan memberikan masukan kepada pihak terkait dalam kerangka pengarusutamaan (PUG) gender di dalam masyarakat khususnya difabel tuna netra.*

**Kata Kunci :** Ketidakadilan Gender, Difabel, Tunanetra dan Pengarusutamaan Gender

### **Abstract**

*Gender issues and gender injustice still color the social relations that occur in society. Various gender injustices can be experienced by women and men. Gender discrimination also creates an unequal relationship. Discrimination issues are also generally experienced by people with disabilities. The visually impaired, both men and women, are no exception. In fact, women with visual impairments experience a greater gender bias. When people with visual impairments experience social and gender discrimination, of course it is a condition of multiple discrimination. This community service is interested in seeing gender issues that occur in people with visual impairments. From initial discussions with blind people about gender issues, it shows that they have not been given relatively good insight and assistance. In fact, in the context of social life, gender injustice, gender bias and gender conflict often occur. Socialization is needed regarding the understanding of concepts, theories and practical illustrations of gender justice for knowledge and internalization of blind people with disabilities, both men and women. For this reason, community service is carried out, with the method used is the process of assisting people with disabilities through socialization, awareness and internalization of Gender equality and justice in Families with Blind Disabilities in the Pertuni Environment, North Sumatra. Whereas the follow-up*

*plans for community service include: Conducting outreach and assistance to families with disabilities to see the internalization of gender sensitivity in gender relations practices, installing service signs at service locations, evaluating all service implementations, evaluating gender construction maps in Pertuni Medan. It is hoped that the evaluation of the gender construction map will provide input to related parties in the framework of gender mainstreaming (PUG) in society, especially the blind.*

**Keywords:** *Gender Inequality, Disabilities, Blind and Gender Mainstreaming*

## 1. PENDAHULUAN

Isu gender menjadi isu dalam relasi sosial yang terjadi di masyarakat dalam beberapa dekade ini. Pada sebagian besar masyarakat isu sistem sosial dalam lingkup patriarki menjadi menjadi isu bias gender dimana perempuan mendapat ketidakadilan gender dalam beberapa konsep praktik sosial di stereotip, subordinasi, marginalisasi, kekerasan dan sebagainya. Praktek ketidakadilan gender terjadi pada konteks interaksi sosial dan kehidupan sosial sehari-hari. Jika kita mengamati isu diskriminasi gender pada perempuan maupun laki-laki. Ini bisa terjadi pada perempuan dengan berbagai keterbatasan bisa menerima bias-bias gender dalam praktek kehidupan sehari-hari. Tentu hal ini tidak sesuai dengan program PUG dalam Inpres no 9 tahun 2000. Harapan dari PUG ini terjadi kesetaraan dan keadilan gender tanpa terkecuali kepada kaum difabel laki-laki maupun perempuan.

Isu difabel terkait dengan isu perempuan difabel yang terpinggirkan dan isu relasi gender yang terjadi dalam relasi sosial di masyarakat. Banyak kajian yang menyoroti bahwa perempuan difabel mengalami diskriminasi ganda karena keterbatasan kemampuannya. Dalam kepemimpinan internasional bagi perempuan difabel di Bethesda Maryland Amerika Serikat 15-20 Juni 1997 mengemukakan bahwa perempuan difabel merupakan kelompok yang paling menderita. Jika perempuan umumnya masih berkuat dengan masalah ketidakadilan gender dalam lingkup stereotip, subordinasi, kekerasan, peran rangkap tiga, dan marginalisasi serta stigma peran domestik dan

publik. Pada perempuan difabel permasalahan yang muncul malah lebih kompleks. Perempuan dengan disabilitas mengalami pengabaian, pelecehan dan penghinaan di hampir segala aspek kehidupan (Komalasari, 2020).

Membahas isu gender dan kekerasan terhadap kaum difabel bisa kita lihat data berikut. Dalam Catahu 2020, angka kekerasan terhadap perempuan disabilitas cenderung tetap dibanding Catahu 2019. Di 2019 tercatat 89 kasus dan di 2020 tercatat 87 kasus. Namun ia melihat ada kenaikan spesifik kasus kekerasan seksual dari 69 persen di 2018 menjadi 79 persen di 2019 (CNN Indonesia, 2020). Dalam ranah gender maupun dalam kecacatan, seorang perempuan difabel mendapatkan label lemah dan pasif, sementara itu, perempuan difabel cenderung mendapatkan stereotip lebih kuat tentang ketergantungan, kepasifan dan kelemahan dibandingkan dengan pria difabel (Demartoto, 2005).

“Berbagai ketidakadilan yang seringkali dialami perempuan penyandang difabel yaitu *double* diskriminasi, meliputi diskriminasi gender dan diskriminasi disabilitas antara budaya patriarkal dan ableisme. Antara lain seperti subordinasi yang menganggap perempuan disabilitas tidak memiliki kapasitas/kemampuan sehingga suaranya tidak dianggap atau didengarkan,” ujar pengurus Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (Sapda), Renny. Renny menambahkan bentuk ketidakadilan lainnya yaitu adanya stigma atau stereotip yang menganggap perempuan difabel tidak sanggup mengurus hal domestik, apalagi hal publik.

“Perempuan dengan keterbatasan juga sering mendapatkan kekerasan berupa fisik ataupun seksual dari pasangan, keluarga, atau masyarakat. Inilah pentingnya memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada mereka untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang mengancam mereka kapan pun dan di mana pun”, tegas Renny (Fathurrohman, 2019).

Persoalan gender pada perempuan difabel ini juga melanda pada difabel tunanetra. Seperti kita ketahui difabel tunanetra memiliki keterbatasan kekurangan yang cukup tinggi untuk melaksanakan aktivitas karena mereka berkekurangan dalam melihat. Ada hal yang menarik karena banyak tunanetra menikah dan menjadi pasangan. Tentu ini menimbulkan relasi gender yang terjadi di dalam keluarga difabel tunanetra. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak permasalahan gender yang melekat pada difabel dan terutama pada keluarga pasangan difabel yang sama sekali tidak pernah menjadi perhatian baik oleh masyarakat non difabel maupun oleh masyarakat difabel itu sendiri. Konflik yang terjadi karena “ketidaksempurnaan istri” dalam keluarga pasangan difabel sering menjadi pemicu permasalahan gender. Andaian di masyarakat mengenai feminitas dan maskulinitas, serta akibat totemisme gender yang menyebabkan pekerjaan tertentu disimbolkan sebagai kegiatan perempuan juga melekat dalam keluarga pasangan difabel (Demartoto, 2005; 6).

Menyadari permasalahan tersebut maka pentingnya relasi gender pada kaum difabel tunanetra terkait dalam upaya meningkatkan keadilan gender. Maka diperlukan juga partisipasi seimbang dalam relasi pasangan kaum difabel tunanetra untuk bisa mengerti dan sadar untuk melaksanakan relasi gender. Fokus sosialisasi, kesadaran dan internalisasi dari kesetaraan dan keadilan gender ini tidak hanya melibatkan perempuan (istri), tetapi

lebih ditujukan kepada keduanya (suami- istri) yang kemudian dikenal dengan istilah relasi gender. Dari relasi yang berkeadilan gender, muncul peran-peran komunitas antara keduanya yang dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui kodrat keduanya baik peran domestik maupun publik. Pentingnya pendampingan dalam sosialisasi sehingga menimbulkan kesadaran sensitivitas gender dan bisa menghasilkan internalisasi maka sangat diperlukan pelaksanaan pengabdian masyarakat bagi kaum difabel tunanetra perempuan dan pasangan mereka.

Menurut laporan Bank Dunia bahwa 20% dari Penyandang Difabel di seluruh dunia berasal dari kelas ekonomi lemah (Putri, 2015). Dengan keadaan yang serba kekurangan baik secara pendidikan, relasi sosial dan ekonomi, kalangan Penyandang Difabel Tunanetra membutuhkan perhatian banyak pihak untuk meringankan penderitaannya. Hal ini sejalan dengan substansi *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), konvensi ini menegaskan para penyandang disabilitas sebagai pemegang hak bukannya penerima belas kasihan atau bentuk pemberian lainnya sehingga selayaknya negara dan anggota masyarakat lainnya menghancurkan pandangan yang menghalangi pemenuhan hak asasi mereka. Hal ini ditegaskan dalam Prinsip-Prinsip Umum Konvensi Penyandang Disabilitas (pasal 3) yaitu :

1. Penghormatan martabat, otonomi pribadi serta kebebasan Penyandang Disabilitas
2. Non Diskriminasi
3. Partisipasi penuh dan efektif serta inklusi dalam masyarakat
4. Penghormatan atas perbedaan Penyandang Disabilitas dan penerimaan mereka sebagai bagian dari masyarakat yang beragam
5. Kesetaraan kesempatan berbagai akses
6. Kesetaraan kesempatan pendidikan

7. Kesetaraan antara perempuan dan laki laki
8. Penghormatan kemampuan yang berkembang bagi anak yang menyandang disabilitas.

Dapat kita lihat poin ketujuh dari CRPD adalah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Ini merupakan poin yang bisa diaplikasikan melalui pengabdian masyarakat ini. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa isu gender menjadi isu yang merambah juga kepada persoalan difabel tunanetra ini. Sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi mitra adalah dengan melakukan sosialisasi, penyadaran dan internalisasi keadilan dan kesetaraan gender pada kaum difabel tunanetra. Adapun manfaat melakukan sosialisasi, penyadaran dan internalisasi keadilan dan kesetaraan gender dengan perincian sebagai berikut:

- a) Dapat memberikan informasi yang benar dan lengkap berupa sosialisasi permasalahan isu-isu patriarki, isu gender yang muncul secara empirik, berdasarkan konsep PUG dan SDGs.
- b) Memberikan informasi yang benar dan lengkap dalam kerangka penyadaran sensitivitas gender sehingga para Penyandang Difabel

## 2. METODE PELAKSANAAN

Adapun metode pelaksanaan yang akan dilakukan dalam mendukung realisasi kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah :

1. Melakukan bedah kasus atas situasi aktual ketidakadilan gender yang terjadi dalam relasi keluarga, organisasi dan masyarakat.
2. Melaksanakan sosialisasi dan forum pembelajaran yang bertema “sensitivitas gender” dimana akan dilakukan berbagai ceramah dan pendampingan dalam rangka

Tunanetra perempuan, keluarga baik suami dan anak juga pengurus di Pertuni Sumut bisa membuka ruang penyadaran sensitivitas gender. Hal ini tentu akan berkorelasi pada relasi gender difabel tunanetra baik perempuan dan laki-laki dalam praktik relasi gender di rumah tangga dan di institusi dan komunitas mereka.

- c) Memberikan informasi yang benar dan lengkap dalam isu-isu kesetaraan dan keadilan gender, sehingga diharapkan menjadi proses internalisasi kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan sosial kaum difabel tunanetra, keluarga, komunitas dan institusi. Hal ini tentu akan segera mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam relasi lingkup kecil di kaum difabel tunanetra secara khusus dan masyarakat secara luas.

penyadaran kesetaraan dan keadilan gender.

3. Melakukan *games* gender dan pendampingan untuk membongkar persepsi keadilan gender pasangan difabel tunanetra
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dengan mengambil sampel pada beberapa keluarga dan mengundang dalam sebuah forum di Sekretariat Pertuni Provinsi Sumatera Utara.

Adapun gambaran pelaksanaan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.1 Alur Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Untuk mendukung keberhasilan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini sudah barang tentu perlu mendapat dukungan pihak mitra. Mitra dalam hal ini adalah Pengurus dan anggota Pertuni Provinsi Sumatera Utara. Pertuni menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian yaitu di Sekretariat Pertuni Provinsi Sumatera Utara.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian tentang kesetaraan dan keadilan gender dengan tujuan penyadaran dan internalisasi pada PUG Inpres no 9 tahun 2000 dilakukan di PERTUNI SUMUT dengan menyasar pada pengurus dan anggotanya. Metode yang dilakukan adalah dalam bentuk ceramah, FGD dan melakukan penyadaran dengan memberikan penyadaran pada beberapa individu secara langsung. Adapun uraian kegiatan dapat kita lihat pada deskripsi dibawah ini.

1. Pelaksanaan kegiatan pertama dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021 dengan melakukan kunjungan ke sekretariat PERTUNI SUMUT di jalan Sampul Medan untuk melakukan pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan kegiatan pengabdian dan sekaligus memberitahukan kepada pengurus untuk tujuan dan manfaat kegiatan ini.



Gambar 3.1. Kunjungan Perwakilan Tim Pengabdian ke Pertuni DPD Sumut untuk mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Pelaksanaan kegiatan kedua dilakukan pada tanggal 14 Juli 2021 juga melakukan kunjungan untuk mendiskusikan format kegiatan dan mengkoordinasikan peserta yang akan diundang. Koordinasi juga dilakukan untuk pengamanan teknis lokasi, hal ini karena situasi pandemi covid-19 menyebabkan area pelaksanaan harus dilakukan protokol kesehatan yang ketat agar resiko penularan virus bisa dihindari.
3. Pelaksanaan kegiatan ketiga dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021 bertempat di kantor sekretariat PERTUNI SUMUT. Tim pengabdian masyarakat melaksanakan acara dengan dibantu oleh beberapa mahasiswa program studi sosiologi Fisip USU. Pengurus Pertuni Sumut yang hadir berjumlah 15 orang yang terdiri dari tuna

netra laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan acara dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dengan mengukur suhu tubuh, menyemprot *hand sanitizer* buat peserta dan hadirin, juga memberikan masker jika ada peserta yang lupa menggunakan masker. Adapun susunan acara pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- Pembukaan acara oleh Rahman Malik, S.Sos., M.Sos (anggota pengabdian)
- Pembacaan doa oleh Hamdani Manurung (Mahasiswa)
- Kata sambutan dari Pertuni Sumut bapak Syaiful Daulay
- Kata sambutan dari USU oleh ketua pengabdian Dr. Harmona Daulay, M.Si
- Pelaksanaan Ceramah oleh Dr. Harmona Daulay, M.Si
- Acara tanya jawab bersama peserta
- Acara penutup yaitu ramah tamah  
Ada acara pelaksanaan pengabdian ini dimulai dengan ceramah membuka wawasan pengurus Pertuni Sumut tentang isu masyarakat patriarki, konsep

perbedaan seks dan gender. Kemudian setelah menjelaskan konsep tersebut dilanjutkan menjelaskan bagaimana praktek ketidakadilan gender yang terjadi didalam kehidupan sosial selama ini. Pembukaan wawasan ini memberikan pemahaman yang luas bagi seluruh peserta karena sebagian besar peserta tidak terlalu paham dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inpres no 9 tahun 2000. Pembukaan wawasan ini membuka interaktif dalam berdiskusi yang berjalan dengan suasana yang cukup dinamis. Pada sesi diskusi ini pertanyaan-pertanyaan kritis dalam relasi gender yang mereka alami atau yang menurut mereka perlu penegasan dan pemahaman yang luas ditanyakan dengan antusias oleh para peserta. Dialog aktif antara sesama peserta tentang praktek relasi gender yang tidak berkeadilan menjadikan acara sosialisasi menjadi efektif.



**Gambar 3.2. Kegiatan Ketiga terkait dengan Proses Sosialisasi, Penyadaran dan Internalisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender pada Pengurus Pertuni DPD Sumut**

4. Pelaksanaan kegiatan ke-4 dilakukan dengan acara ceramah pengabdian yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2021 bertempat

di sekretariat PERTUNI SUMUT jalan Sampul Medan. Acara dihadiri oleh pasangan tuna netra beserta anak mereka yang sudah remaja

dengan sejumlah 40 orang. Acara juga dihadiri oleh tim pengabdian masyarakat dan mahasiswa program studi sosiologi Fisip USU. Adapun susunan acara dalam pelaksanaan ceramah ini adalah sebagai berikut:

- Pengantar oleh protokol Noor Atika (Mahasiswi Sosiologi Fisip USU)
- Pembacaan doa oleh Hamdani Manurung (Mahasiswa)
- Kata sambutan dari wakil ketua Pertuni bapak Hairul
- Kata sambutan dari anggota pengabdian masyarakat Drs.T.Ilham Saladin, MSP
- Pelaksanaan Ceramah oleh Dr. Harmona Daulay, M.Si
- Acara tanya jawab bersama peserta
- Acara penutup yaitu ramah tamah





**Gambar 3.3. Proses Sosialisasi, Penyadaran dan Internalisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender pada Anggota Pertuni DPD Sumut**

Pelaksanaan acara ceramah ini memberikan penyadaran tentang informasi isu-isu sensitivitas gender, konsep dan praktek patriarki yang selama ini terjadi secara empirik. Hal ini sangat terkait dengan pemberian informasi yang akan memberikan mereka wawasan dan diharapkan bisa menginternalisasi dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada sesi tanya jawab para peserta baik laki-laki dan perempuan sangat antusias memberikan pertanyaan tentang isu-isu patriarki yang terjadi dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Para peserta menanyakan kasus-kasus relasi dominasi yang terjadi didalam rumah tangga maupun dalam sistem sosial kemasyarakatan. Diskusi terjadi sangat dinamis, apalagi ketika topik diskusi berlanjut pada isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai kepada isu- isu kekerasan simbolik.

Pada dinamika diskusi memperlihatkan peserta sangat antusias untuk memahami isu ketidakadilan gender ini. Dinamika diskusi kelompok begitu hidup, pertanyaan kritis ditanyakan oleh perempuan difabel tunanetra.

Para laki-laki difabel tunanetra juga tidak ketinggalan memberikan berbagai argumentasi tentang nilai patriarki yang terjadi berdasarkan etnis yang mereka alami sendiri. Suatu analisa dinamika diskusi memperlihatkan sensitivitas perempuan difabel tunanetra dengan tingkat pendidikan tinggi yang mencapai jenjang Strata 1 sarjana mempunyai analisis yang lebih kritis dan sangat mendukung kepada situasi PUG. Diharapkan dengan hal ini bisa mencerahkan wawasan peserta dan bisa mempercepat pada terwujudnya PUG.

Pendampingan yang dilakukan di tempat tinggal mereka juga memberikan manfaat yang baik untuk memantau praktek relasi gender yang terjadi dalam relasi ayah, ibu dan anak mereka. Penyadaran dalam bentuk ceramah gender yang juga dihadiri anak mereka yang sudah remaja diharapkan bisa memberikan persamaan persepsi tentang bagaimana mempraktekkan isu kesetaraan dan keadilan gender di dalam keluarga batih mereka. Diharapkan jika dalam keluarga-keluarga telah terjadi praktek relasi gender yang baik akan berkorelasi dalam relasi sosial di dalam masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Penyadaran ini diharapkan bisa membuka wawasan sensitivitas dan praktek sosial dalam relasi gender yang berkeadilan sehingga berbagi bentuk ketidakadilan gender seperti stereotip gender, subordinasi, peran rangkap tiga perempuan, marginalisasi dan kekerasan bisa diminimalisir untuk tidak akan terjadi lagi. Apalagi ketika penyadaran ini juga melibatkan anak mereka yang sudah remaja sehingga diharapkan dapat terjadi perubahan sosial dari agen perubahan sosial yaitu orang tua mereka yang difabel tuna netra dan anak mereka sebagai generasi milenial. Harapan sederhana dari pengabdian masyarakat ini ketika wawasan dan sensitivitas

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan salah satu hasil dari bentuk Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh NON PNBPU Universitas Sumatera Utara dengan Nomor 184/UN5.2.3.2.1/PPM/2021. Oleh sebab itu, tim pengabdian ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) USU terutama kepada Rektor Universitas Sumatera Utara atas dukungan dan fasilitas yang diberikan. Terima kasih juga kepada mitra PERTUNI pada kegiatan pengabdian ini. Terimakasih juga disampaikan kepada para difabilitas tunanetra yang telah bersedia bekerjasama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asmi, Suryani E. (2016). *Gerakan Sosial Pertuni Surabaya Memperjuangkan Hak Tunanetra Sebagai Warga Negara*. Program Magister Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.
- CNN Indonesia. (2020). *Jangan Abai, 79 Persen Wanita Difabel Alami Kekerasan Seksual*. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201203182940-284-577722/jangan-abai-79-persen-wanita-difabel-alami-kekerasan-seksual> pada tanggal 1 Maret 2021
- Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Diakses melalui <http://ham.go.id/download/report-crpd/> pada tanggal 1 Maret 2021
- Darwin, Muhajir 2001, *Menggugat Budaya Patriarkhi*, Penerbit PPK UGM, Yogyakarta
- Demartoto, Argyo. (2005). *Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difabel*. Surakarta : Sebelas Maret University Press
- Fakih, Mansour, 1996 , *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Fathurrohman. (2019). *Diskriminasi Terhadap Perempuan Disabilitas Masih Tinggi*. Diakses melalui <https://fin.co.id/2019/12/14/diskriminasi-terhadap-perempuan-disabilitas-masih-tinggi/> pada tanggal 1 Maret 2021
- Komalasari, Dewi. (2020). *Kerentanan Perempuan Disabilitas terhadap Kekerasan Berbasis Gender*. Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan.
- Lips, Hilary M., 2005, *Sex & Gender an Introduction*, MC. Graw Hill, NY. Hal
- Malik, Rahman. (2019). *Perlawanan Masyarakat Minoritas Dalam Perencanaan Pembangunan*

- Perkotaan. Jurnal Simulacra Universitas Trunojoyo, Madura.
- Megawangi, Ratna, 1999, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Mizan, Bandung
- Nugroho, Sapto dan Risnawati. 2004. *Meretas Siklus Kecacatan Realitas Yang Terabaikan*. Surakarta : Ford Foundation dan Yayasan Talenta.
- Putri, Adhis Anggiany. (2015). *Perlindungan Sosial, Hak Penyandang Disabilitas*. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/11/0643015/Perlindungan.Sosial.Hak.Penyandang.Disabilitas>. pada tanggal 1 Maret 2021
- Tarsidi, Didi dan Permanarian Somad. (2009). *Penyandang Ketunaan: Istilah Alternatif Terbaik untuk Menggantikan Istilah "Penyandang Cacat"*. Jurnal Asesmen dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus